

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Kualitas informasi dalam laporan keuangan pemerintah tersebut sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sistem akuntansi yang handal.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 71 Tahun 2010).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pelaksanaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun oleh Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan konsolidasi laporan keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Standar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal ini kepala instansi pemerintahan. Selanjutnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) memberikan wewenangnya kepada bidang akuntansi untuk menyusun seluruh laporan keuangan yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh bidang akuntansi lebih sulit dibandingkan dengan laporan keuangan yang dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), karena bidang akuntansi harus menyusun dan menggabungkan seluruh laporan keuangan yang di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sampai menjadi laporan keuangan konsolidasi atau gabungan antara laporan keuangan dari seluruh satuan kerja perangkat daerah sampai menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal dapat dibandingkan, serta dapat dipahami atau dikatakan sebagai laporan keuangan yang berkualitas sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010.

Didalam laporan keuangan yang berkualitas, tentunya harus disusun oleh sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya. Dalam hal ini yaitu sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan akuntansi. Apabila penempatan sumber daya manusia tidak sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh penyusun

laporan keuangan, maka tidak akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai suatu yang terpenting (Wibowo, 2007 : 86).

Maksud dari pengertian kompetensi tersebut bahwa penempatan bidang oleh sumber daya manusia yang berkompeten harus berdasarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, sehingga apa yang dikerjakan bisa memudahkan sumber daya manusia tersebut didalam mengerjakan suatu pekerjaan.

Menurut Boyatziz dalam (Sudarmanto, 2009: 40) ada lima karakteristik utama didalam kompetensi yaitu motif, sifat, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan. Melihat karakteristik yang terdapat didalam kompetensi tersebut, dapat dikatakan bahwa jika penempatan bidang sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki, maka lebih memudahkan sumber daya manusia yang berkompetensi tersebut untuk melakukan kelima karakteristik yang terdapat didalam kompetensi.

Selain kompetensi, hal yang mendasar dan penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas adalah sistem akuntansi

keuangan daerah. sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 21 Tahun 2011).

Dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan informasi dalam pertanggungjawaban penggunaan dana.

Pada dasarnya pemerintah daerah telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan mampu mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas. Pengembangan sebuah sistem yang tepat untuk dapat diimplementasikan di daerah menghasilkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan dapat memudahkan aparatur untuk menyusun laporan keuangan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo yang memiliki 5 bidang yakni akuntansi, anggaran, aset, pendapatan, dan sekretariat. Didalam 5 bidang tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing untuk melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya. Selan itu, Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Gorontalo memiliki foksi tersendiri sebagaimana diatur didalam peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh bupati Kabupaten Gorontalo.

Didalam peraturan bupati Gorontalo Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo bahwa tugas dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo yaitu menyusun laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo. Badan Keuangan Daerah merangkul seluruh laporan keuangan yang ada pada setiap Satuan Kerja Perangkat Dearah (SKPD) kemudian digabungkan sampai menjadi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo.

Berdasarkan uraian tugas dan tanggung jawab Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo di atas, lebih lanjut observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 10 Januari 2017 dengan Bapak Arman Mahmud selaku kepala seksi bagian akuntansi mengatakan bahwa, masih rendahnya kualitas laporan keuangan dengan melihat beberapa catatan-catatan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta pencatatan-pencatatan yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo dan masih kurangnya pemahaman dari sistem akuntansi keuangan daerah. Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari tingkat kompetensi yang dimiliki oleh aparatur, jika aparatur mempunyai kompetensi yang berkualitas maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik, sebaliknya jika tidak mempunyai kompetensi yang

berkualitas maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang kurang baik pula. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah terjadi. Sumber Daya Manusia yang ada masih belum memahami pengetahuan dalam bidangnya.

Kemudian kualitas laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah masih rendah dan Sumber Daya Manusia pada instansi tersebut masih kurang berkompeten hal itu didukung oleh sistem akuntansi pada tahun 2014 masih berbasis kas, kemudian pada tahun 2015 diterapkan sistem akuntansi berbasis akrual sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah harus mendapatkan pelatihan dan pembelajaran penuh mengenai *accrual basic*.

Hal ini dapat dilihat dari data tingkat pendidikan pegawai pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo. (Sumber, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo).

Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Pegawai

No	Bidang	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah
1	Akuntansi	SMA IPS	1
		SMK Elektronika Komunikasi	1
		SMK Manajemen Bisnis	2
		S1 Ekonomi Akuntansi	4
		S1 Komputer	1
		S1 Manajemen	1
		S2 Ilmu Administrasi	1
2	Anggaran	SMA IPS	5
		SMK Bangunan	1
		SMK Ekonomi Akuntansi	2
		SMK Manajemen Bisnis	1
		SMK Perdagangan	1

		SMK Perkantoran	1
		D-3 Ekonomi Akuntansi	2
		D-3 Teknik	1
		S1 Ekonomi Akuntansi	2
		S1 Ekonomi Manajemen	6
		S1 Ekonomi Pembangunan	2
		S1 Sosial Sosial Politik	1
		S1 Teknik	1
3	Aset	SMK Ekonomi Akuntansi	1
		S1 Ekonomi Akuntansi	2
		S1 Ekonomi Manajemen	3
		S1 Ekonomi Pembangunan	1
		S1 Hukum	1
		S1 Komputer	4
4	Pendapatan	SMP	1
		MAN Syariah	3
		SMA IPA	2
		SMA Peng. Budaya	1
		SMK Ekonomi Akuntansi	1
		SMK Listrik	1
		S1 Ekonomi Akuntansi	1
		S1 Ekonomi Manajemen	2
		S1 Ilmu Pemerintahan	2
		S1 Pertanian	1
		S1 Teknik Sipil	1
		S2 Ekonomi Akuntansi	1
5	Sekretariat	MAN Syariah	1
		SMA IPS	2
		SMK Tata Buku	1
		SMK Tata Niaga	2
		D-3 Informatika	1
		S2 Hukum	1
		S2 Magister Sains	1
		Total	74

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan ilmu akuntansi lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang mempunyai latar belakang non akuntansi.

Hal ini disebabkan karena pegawai tidak memiliki kompetensi yang meliputi motif, sifat, konsep diri, pengetahuan pegawai terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo.

Setiap tahunnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memeriksa laporan keuangan sekaligus memberikan opini terhadap laporan keuangan pemerintah. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik per 31 Maret 2011 ada lima jenis pendapat akuntan yaitu : pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP), pendapat tidak wajar dan pernyataan tidak memberikan pendapat.

Laporan keuangan Badan Keuangan Daerah (BKD) pada tahun 2009 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar dengan pengecualian sampai pada tahun 2013, kemudian di tahun 2015 kemarin kabupaten Gorontalo meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) plus dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Gorontalo. Walaupun Badan Keuangan Daerah (BKD) sudah dikatakan WTP tetapi beberapa temuan signifikan terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sistem pengendalian intern yang perlu mendapat perhatian, (Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo) antara lain :

1. Manajemen kas Pemerintah Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

2. Struktur organisasi dan pelaksanaan pengelolaan Kas Daerah Tahun Anggaran 2009 pada Sekretariat Daerah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Manajemen pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah tidak didukung pengendalian yang memadai.
4. Pemerintah Daerah masih menerapkan dua metode dalam penyetoran pajak pihak ketiga ke Kas Negara.
5. Aset Tetap dan Aset Lainnya belum seluruhnya diklasifikasikan secara lengkap dalam rincian objek dan belum sepenuhnya didukung data yang memadai.
6. Pengendalian terhadap sistem aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya memadai.

Melihat temuan di atas dapat dilihat bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada kualitas laporan keuangan. Berangkat dari uraian diatas, peneliti mencoba untuk menguji kembali penelitian sebelumnya oleh Nyoman, dkk (2014), dengan judul “Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng” yang menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif

dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, dan kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian peneliti, yaitu judul yang diambil oleh peneliti sebelumnya adalah pengaruh kompetensi SDM, Penerapan SAP dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Buleleng, sedangkan peneliti mengambil judul pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada badan keuangan daerah Kabupaten Gorontalo, perbedaan lainnya juga dapat dilihat dari tempat dan waktu penelitian, dalam penelitian terdahulu yang menjadi tempat penelitian yaitu seluruh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Buleleng dan penelitiannya dilakukan pada tahun 2014 sedangkan penelitian peneliti bertempat di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo dan waktu penelitiannya dilakukan pada tahun 2017.

Berdasarkan masalah-masalah yang diuraikan diatas oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo** “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas,maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4 Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu akuntansi yaitu bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor publik.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada aparat Badan Keuangan Daerah kabupaten gorontalo dalam sistem akuntansi keuangan daerah guna mewujudkan kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga diharapkan aparat Badan Keuangan Daerah dapat menyelenggarakan program-program pada peningkatan kualitas dan kapabilitas.